



**PEMERINTAH  
KABUPATEN PASER**

**RENSTRA  
2022 - 2026**

*revisi 2023*

# **RENCANA STRATEGIS**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2  
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser  
Kode Pos 76211, Email : [kesbangpol\\_paser@yahoo.com](mailto:kesbangpol_paser@yahoo.com)

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana kerja selama lima tahun yang menggambarkan penjabaran visi, misi dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk lebih mengarahkan tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sebagai dasar tuntunan dalam menerapkan kebijakan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik serta sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan penutup.

Demikian rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022-2026 ini dibuat semoga bermanfaat dan menjadikan tujuan bersama lebih terarah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Paser



**Nonding, S.Sos.MM**

Pembina Utama Muda / IV c

Nip.197106071997031007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi .....	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	45
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah .....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	48
5.1. Strategi .....	48
5.2. Arah Kebijakan .....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....	65
BAB VIII PENUTUP .....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

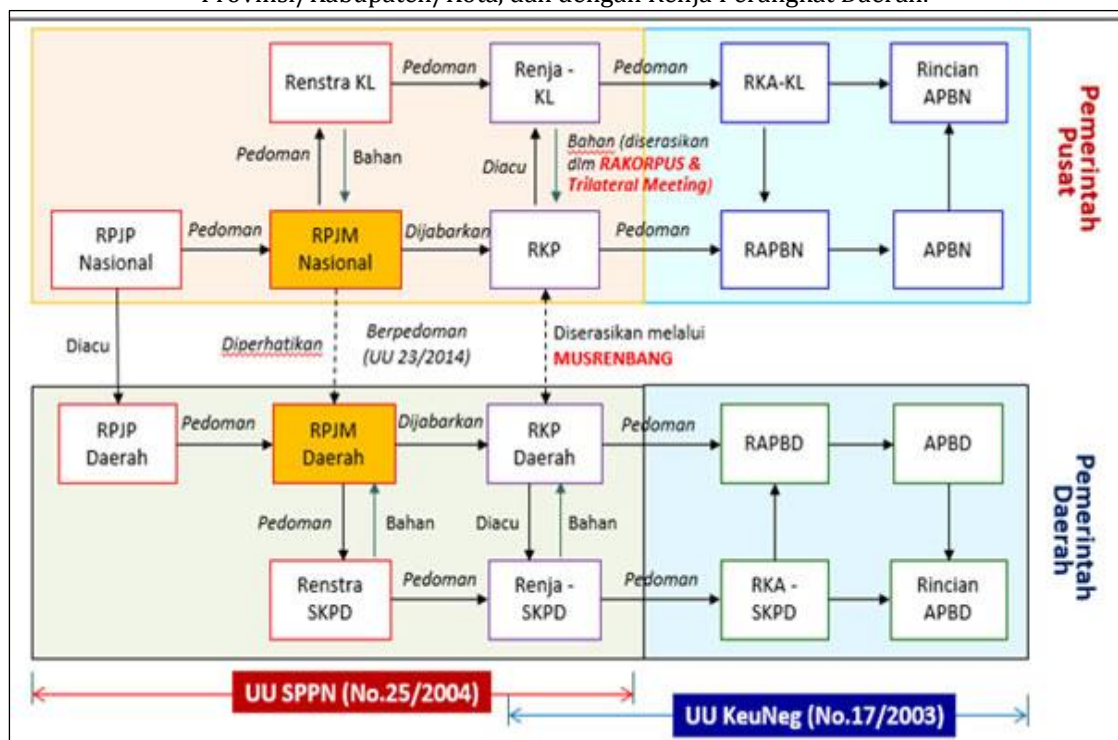
Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis yang disusun bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan lima tahunan Daerah. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Kabupaten Paser dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : UU SPPN, 2005

Pada bagan di atas, juga ada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan.

Pada bagan di atas juga tergambar bahwa RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang

menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, perlu dilakukan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
  12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
  13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
  15. Undang-undang nomor 7 tahun 2012 dan peraturan nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
  23. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser 2021 - 2026 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Di samping itu juga untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.



## 2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam pencapaian misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta pihak terkait dalam upaya Pembangunan dalam pencapaian visi pemerintah daerah 2021-2026 yaitu Menuju Kabupaten Paser Yang maju adil dan Sejahtera.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

### 1.4 Sistematika

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 – 2026, terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta apa saja Sumber Daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAB II terdiri dari:

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menguraikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan politik, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis. Pada bab ini terdiri dari:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. BAB IV terdiri dari:

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI terdiri dari:

- 6.1 Rencana Program
- 6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

### **BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD

### **BAB VIII : PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan penutup dan kesimpulan Rencana Strategis secara umum.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### 2.1.2. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati Paser dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

### **2.1.3. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai berikut :

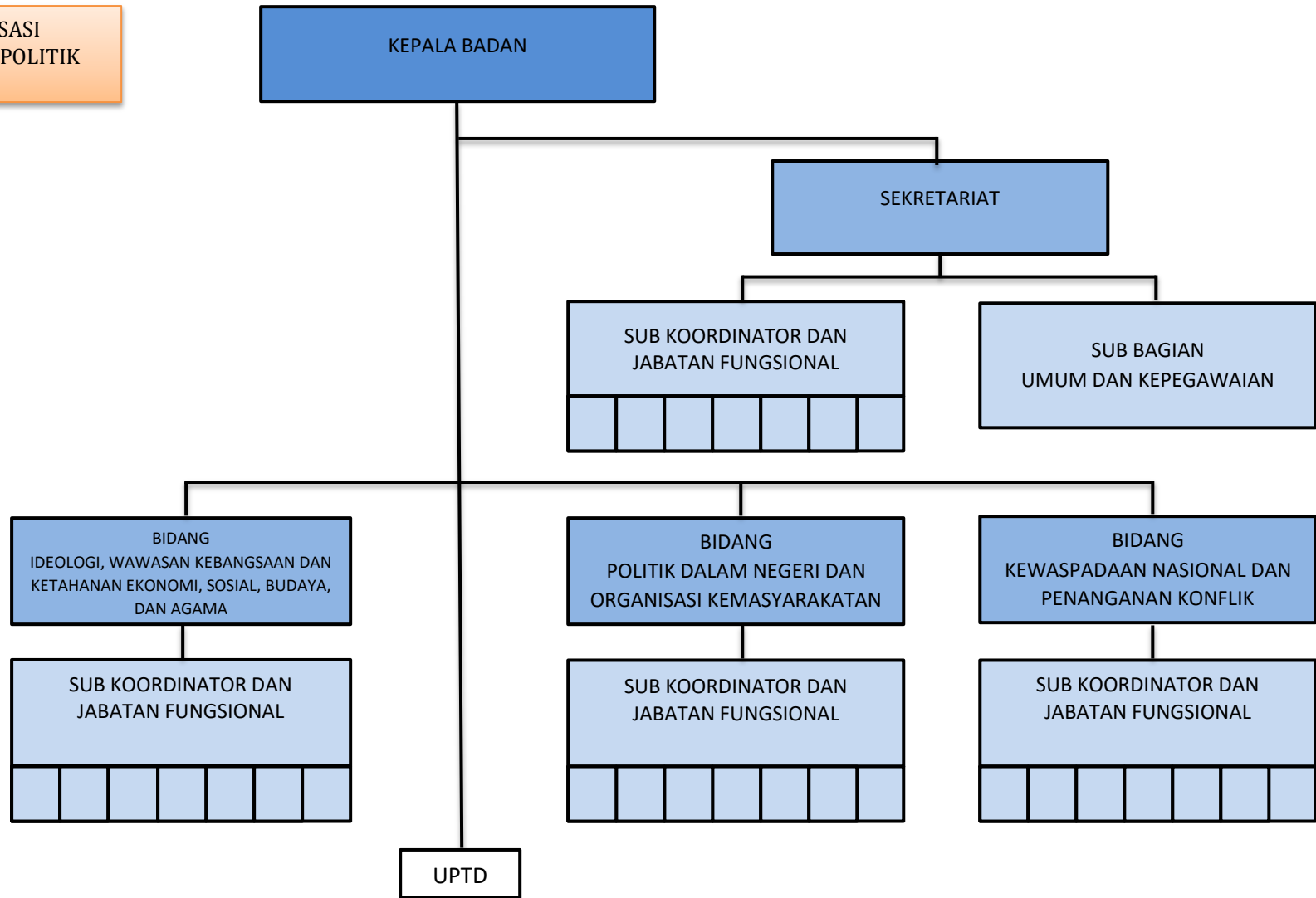
- I. Kepala Badan
- II. Sekretariat, membawakan :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Kelompok Jabatan fungsional
- III. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, agama membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- IV. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan Jabatan Fungsional
- V. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik membawahkan Jabatan Fungsional
- VI. UPTD

## VII. Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Paser dapat dilihat pada bagan berikut ;

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASER



Sumber : Peraturan Bupati Paser 65 Tahun 2021

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan peta jabatan struktural dan fungsional, Badan Kesbangpol membutuhkan setidaknya sebanyak 49 pegawai. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Paser Nomor 71 tahun 2020 tentang Peta jabatan Aparatur Negeri Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini per Juni 2022 adalah sebanyak 37 orang. Dari jumlah pegawai tersebut ada sebanyak 10 orang pegawai tidak tetap yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

**JUMLAH PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2022**

No	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA			JUMLAH KEBUTUHAN	Kelebihan / Kekurangan	
		PNS	PTT	JUMLAH		+	-
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27	10	37	49		12
	<b>J U M L A H</b>	27	10	37	49	- 24.49 %	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kab. Paser

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser masih mengalami kekurangan tenaga sebanyak 12 (dua belas) orang pegawai.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.

Adapun Kondisi kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2022

No	PENDIDIKAN	Jumlah ( Orang )	%
1.	Strata 3	-	-
2.	Strata 2	4 Org	10.81
3.	Strata 1	18 Org	48.65
4.	Diploma 4	-	-
5.	Diploma 3	2 Org	5.40
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12 Org	32.43
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1 Org	2.70
8.	Sekolah Dasar	-	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kab. Paser

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 di atas, tingkat pendidikan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cukup memadai. Tingkat pendidikan aparatur yang paling banyak adalah berpendidikan sarjana atau Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 18 orang (48.65 %). Selanjutnya kedua terbanyak adalah tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 12 Orang (32.43 %). Sedangkan ketiga terbanyak adalah berpendidikan Pasca Sarjana atau Strata 2 (S2), yaitu sebanyak 4 orang (10.81 %). Dan berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 Orang (2.70 %). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Pegawai yang latar belakang Pendidikan Strata 3, Diploma 4, dan Sekolah Dasar.

### 2.2.2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan alokasi anggaran berpariatif dari tahun ke tahun. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :



Tabel 2.2.2

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN  
BADAN KESATUANB BAGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASER

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN ( RP )	REALISASI ( RP )	PERSENTASE (%)
1.	2017	4.150.416.715	3.353.596.464	80,8
2.	2018	5.835.779.695	5.335.447.168	91,4
3.	2019	4.909.311.200	4.070.646.826	83
4.	2020	6.036.759.866	4.714.953.286	78,1
5.	2021	8.777.955.811	7.092.627.743	81
6.	2022	9.234.481.589	8.812.555.652	95.43

Sumber: laporan realisasi anggaran Kesbangpol Kab. Paser TA. 2017-2022

Dari tabel diatas secara umum menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah anggaran setiap tahunnya, yaitu dari 4,15 milyar lebih di tahun 2017 menjadi 8,05 milyar lebih pada tahun 2021. Pada tahun 2018 telah terjadi peningkatan anggaran yang cukup besar, yaitu sebesar 5,83 milyar lebih. Hal ini adalah dari antuan subsidi Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan Pilkada Gubernur tahun 2018.

Dari table diatas juga terjadinya penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan terjadinya pandemic covid-19. Selain itu dalam tahun yang sama telah dilakukan Refocusing anggaran yang diperuntukkan guna penanganan dan penanggulangan wabah covid-19.

### 2.2.3. Aset/Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.2.3  
KEADAAN ASET, SARANA DAN PRASARANA  
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PASER TAHUN 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI	TAHUN PENGADAAN	KET
1	Meja Rapat	1	Baik	2017	
2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (Aktiv)	4	Baik	2017	
3	PC. Unit (Acer/Aspire TC-708)	1	Baik	2017	
4	Kursi Biasa	4	Baik	2017	
5	Mesin Ketik Manual Standard (Olympia	2	Baik	2018	
6	Filling Cabinet Bei (Frontiline)	2	Baik	2018	
7	Kursi Tamu	2	Baik	2018	
8	AC Split (Sharp 2 PK)	2	Baik	2018	
9	AC Split (Sharp 1 PK)	3	Baik	2018	
10	Gorden/Tirai	4	Baik	2018	
11	Meja Kerja Pejabat lain lain (Aktiv)	6	Baik	2018	
12	Kursi Pejabat Lainnya	5	Baik	2018	
13	Kursi Rapat	21	Baik	2018	
14	PC Unit (Lenovo)	2	Baik	2018	
15	PC Unit (HP)	2	Baik	2018	
16	PC Unit Accer	1	Baik	2018	
17	Laptop	1	Baik	2018	
18	Note Book	2	Baik	2018	
19	Printer (Canon D 2000)	1	Baik	2018	
20	Printer Epson L 120	2	Baik	2018	
21	Printer Canon L 310	1	Baik	2018	
22	Pemasangan AIR PDAM	1	Baik	2018	

23	Pemasangan LISTRIK	1	Baik	2018	
24	Kursi Rapat Staff	23	Baik	2018	
25	Lemari Penyimpanan	5	Baik	2019	
26	Lemari Kayu	1	Baik	2019	
27	Kursi Putar	1	Baik	2019	
28	PC Unit DELL	3	Baik	2019	
29	Printer Epson L 120	4	Baik	2019	
30	Tempat Parkir	1	Baik	2019	
31	Lemari Besi/Metal	3	Baik	2020	
32	Alat Penyimpanan (Herculas)	5	Baik	2020	
33	Meja Kerja Pejabat	13	Baik	2020	
34	Kursi Kerja	2	Baik	2020	
35	Printer Epson L 120	1	Baik	2020	
36	Printer Canon MP 287	1	Baik	2020	
37	Filling Cabinet Besi	1	Baik	2021	
38	LCD Projektor/Infocus	1	Baik	2021	
39	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik	2021	
40	PC. Unit	3	Baik	2021	
41	Laptop Asus	1	Baik	2021	
42	Laptop Lenovo	1	Baik	2021	
43	Note Book Lenovo	2	Baik	2021	
44	Note Book Lenovo	2	Baik	2021	
45	Printer Epson L 5190	3	Baik	2021	
46	Printer Epson M-200	1	Baik	2021	

Sumber: Rekap aset Badan Kesbangpol Kab. Paser

Dari table di atas, tergambar bahwa kondisi asset, sarana serta prasarana yang dimiliki Badan Kesbangpol dengan kondisi yang masih baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagian besar asset tersebut merupakan asset hasil pengadaan tahun 2018.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menggambarkan kinerja pelayanan dapat dilihat dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 5 (lima tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : (TABEL T-C 23)

**TABEL 2.3.**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PASER**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TERGET INDIKA TOR LAINNY A	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>																		
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
B	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>																		
1	Terpenuhinya perbaikan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%

C.	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																		
1	Tersusunnya laporan Hasil kinerja dan Keuangan				2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Buku	100%	100%	100%	100%	100%
D.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah</b>																		
1	Tersusunnya Data statistik Sektoral				1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		100%	100%	100%
E	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>																		
1	Terselenggaranya pembinaan FKPMKT/FKDM				2 Kecamatan	50 orang	1 Kegiatan	10 Kecamatan	500 Orang	2 Kecamatan	50 orang	1 Kegiatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100%	100%	99%	75%	100%
F	<b>Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>																		

1	Tersedianya data dan informasi mengenai masalah aktual di daerah				12 Doku men	12 Doku men	9 Keca matan	10 Keca matan	35 Doku men	12 Doku men	12 Doku men	9 Keca matan	10 Keca matan	10 Keca matan	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terlaksananya sosialisasi tentang penguatan pemahaman konflik di daerah					150 Orang	1 Kegiat an	1 Kegiat an	500 Orang		150 Orang	1 Kegiat an	1 Kegiat an			100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya Data dan terlaksananya pengawasan Orang asing didaerah						3 Keca matan	5 Keca matan	5 Keca matan			3 Keca matan	5 Keca matan	5 Keca matan			100%	100%	100%	
4	Terlaksananya Operasional Kewaspadaan Dini Masyarakat/Lapor an Intelejen																			
<b>G</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>																			
1	Terselenggaranya forum dewan Pembina FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)					1 Kegiat an	158 Orang				1 Kegiat an	158 Orang				100%	100%			
2	Terlaksananya sosialisasi Wawasan Kebangsaan					100 Orang	100 Orang	50 orang	35 orang	250 orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	35 orang	0	100%	100%	100%	100%	0

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

3	Terlaksananya sosialisasi Perkuatan Idiologi Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	50 orang	50 Orang	100 orang	100 Orang	100 Orang	50 orang	50 Orang	0	100%	100%	100%	100%	0
4	Terlaksananya sosialisasi Cinta Tanah Air dan Bela Negara				100 Orang					100 Orang					100%				
5	Terlaksananya sosialisasi Peningkatan SDM Dewan Penasehat FKUB				50 Orang	28 Orang	1 Keca matan			50 Orang	28 Orang	1 Keca matan			100%	100%	100%		
6	Terselenggaranya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)				1 Kegiat an		40 Orang	1 Keca matan	50 orang	1 Kegiat an	158 Orang	96 Orang	1 Keca matan	34 Orang	100%		100%	100%	100%
7	Terlaksananya Fasilitasi FORKOPIMDA						1 Doku men					1 Doku men					100%		
8	Terlaksannya rakor FKUB					158 Orang					158 Orang				100%				
9	Terselenggaranya Sosialisasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)					100 Orang	1 Keca matan	30 Orang			100 Orang	1 Keca matan	30 Orang			100%	100%	100%	
<b>H</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>																		
1	Terselenggaranya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan atas bantuan keuangan parpol				10 Parpo l	10 Parpo l	10 Parpo l	11 Parpo l	11 Parpo l	11 Parpo l	11 Parpo l	11 Parpo l	11 Parpo l	11 Parpo l	100%	100%	100%	100%	100%



2	Terselenggaranya bintek pembuatan laporan Parpol				10 Parpol			35 Orang		10 Parpol			0		100%			100%	0
3	Terselenggaranya Verifikasi dokumen SKT dan SKM Ormas Serta sosialisasi pembinaan ormas				100 orang	100 orang	100 orang	1 dokumen	15 dokumen	100 orang	100 orang	100 orang		15 dokumen	100%	100%	100%		100%
4	Terlaksananya sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur					10 kecamatan					10 kecamatan				100%				
5	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemantauan Pemilu					5 kecamatan	100 Orang	10 Kecamatan	10 Dokumen		10 kecamatan	100 Orang	10 Kecamatan	10 Dokumen		100%	100%	100%	100%
<b>I</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																		
1	Tersusunnya Dokumen Renstra				1 Dokumen					1 Dokumen					100%				
2	Tersusunnya Dokumen Renja				1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja				1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

J	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</b>																			
1	Tersusunnya Dokumen SPIP				1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	100%	0	0	0	100%	
K	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenrtaman dan Ketertiban Umum</b>																			
1	Terlaksananya Fasilitasi FORKOPIMDA							1 Kegiatan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan					100%	100%

Dari table di atas telah tergambar kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Paser dari tahun 2017 – 2021 sudah cukup baik, dimana rasio capaian tiap tahunnya rata-rata 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa target penyelenggaraan tugas pemerintahan rata-rata tercapai tiap tahunnya. Namun demikian dalam tahun 2020 terdapat penurunan target pada program dan kegiatan pembinaan FKDM. Dari target 100 persen, hanya tercapai 75 persen. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan pembinaan FKDM di kecamatan yang tidak dapat dilaksanakan. Beberapa kendala pokok tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan pembinaan FKDM adalah terbentur pada aturan protokoler kesehatan sehubungan pandemi covid 19.

Selanjutnya dalam rangka memberikan gambaran yang lebih real, maka kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari serapan anggaran atau realisasi anggaran tiap tahunnya. Berikut ini disajikan table anggaran dan realisasi anggaran Badan Kesbangpol sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.4.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASER TAHUN 2017 – 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
A	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>															
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	362.817.700	498.861.600	583.883.700	437.219.266		358.833.154	464.593.829	574.058.967	377.553.471		99	93	98	86	
B	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>															
1	Terpenuhinya perbaikan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	84.325.000	407.065.800	134.475.000	92.513.000		83.960.000	402.194.800	132.486.000	82.553.000		100	99	99	89	
C.	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>															
1	Tersusunnya laporan Hasil kinerja dan Keuangan	14.470.000	14.565.000	1.000.000	1.000.000		14.469.500	14.305.000	1.000.000	1.000.000		100	98	100	100	
D.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>															
1	Tersusunnya Data statistik Sektoral	13.177.300		7.780.000	1.330.000		13.177.300		7.780.000	1.330.000		100		100	100	
E	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>															
1	Terselenggaranya pembinaan FKPMKT/FKDM	84.000.000	162.860.000	44.590.000	15.265.500		78.363.100	157.783.000	44.073.800	11.400.000		93	97	99	75	
F	<b>Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>															

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

1	Tersedianya data dan informasi mengenai masalah aktual di daerah (Kominda)	79.863.400	33.486.600	76.401.500	18.400.600		72.864.900	33.486.600	71.528.869	15.570.600		91	100	94	85
2	Terlaksananya sosialisasi tentang penguatan pemahaman konflik di daerah		45.332.600	56.383.500	23.318.500			45.013.200	55.044.160	1.594.000			99	98	7
3	Tersedianya Data dan terlaksananya pengawasan Orang asing didaerah			27.360.500	3.875.000				27.360.000	2.900.000				100	75
4	Terlaksananya Operasional Kewaspadaan Dini Masyarakat/Laporan Intelegen		60.066.400					55.300.400					92		
<b>G</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>														
1	Terselenggaranya forum dewan Pembina FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	16.620.000	53.859.800				16.620.000	52.106.700				100	97		
2	Terlaksananya sosialisasi Wawasan Kebangsaan	38.085.000	46.800.000	26.590.000	16.190.000		38.085.000	41.567.400	26.590.000	14.139.400		100	89	100	87
3	Terlaksananya sosialisasi Perkuatan Idiologi Kebangsaan	40.695.000	67.000.000	15.625.000	19.313.000		40.695.000	66.984.100	15.625.000	19.313.000		100	100	100	100
4	Terlaksananya sosialisasi Cinta Tanah Air dan Bela Negara	122.650.000					122.477.500					100			
5	Terlaksananya sosialisasi Peningkatan SDM Dewan Penasehat FKUB	84.571.600	79.106.200				84.505.600	79.104.100				100	100		
6	Terselenggaranya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	91.436.000		41.055.000	36.468.000		89.313.000		39.249.500	36.365.000		98		96	100
7	Terlaksananya Fasilitasi FORKOPIMDA			234.770.900					231.869.938					99	
8	Terlaksananya rakor FKUB		213.815.800					213.787.300					100		
9	Terselenggaranya Sosialisasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)		96.263.800	63.620.500	28.877.500			92.504.156	63.620.500	28.877.500			96	100	100
<b>H</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>														
1	Terselenggaranya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan atas bantuan keuangan parpol	23.815.520	38.760.000	41.473.800	32.174.000		23.815.520	38.719.900	40.638.885	30.820.500		100	100	98	96

## Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

2	Terselenggaranya bintek pembuatan laporan Parpol	49.470.000			16.227.750		49.467.000			7.249.400		100			45	
3	Terselenggaranya Verifikasi dokumen SKT dan SKM Ormas Serta sosialisasi pembinaan ormas	28.170.000	59.220.000	45.590.000	9.491.500		28.105.000	57.643.400	45.446.865	6.568.250		100	97	100	69	
4	Terlaksananya sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur		1.000.000.000					999.243.676					100			
5	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemantauan Pemilu (Fasilitasi Pemilu)		52.516.000	229.084.800	575.305.000			52.344.000	214.986.319	440.221.082		100	94	77		
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>															
1	Tersusunnya Dokumen Renstra	8.800.000					8.791.000					100				
2	Tersusunnya Dokumen Renja	5.760.000	7.425.000	6.575.000	5.350.000		5.760.000	6.850.000	6.575.000	2.963.000		100	92	100	55	
3	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja	10.450.000	10.375.000	8.875.000	5.000.000		10.449.979	10.375.000	8.875.000	5.000.000		100	100	100	100	
<b>J</b>	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</b>															
1	Tersusunnya Dokumen SPIP	7.555.000	8.360.000	8.960.000	8.770.000		7.555.000	-	-	-		100	0	0	0	
<b>K</b>	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenrtaman dan Ketertiban Umum</b>															
1	Terlaksananya Fasilitasi FORKOPIMDA				568.671.250					451.362.238					79	
	Total Anggaran belanja dan Realisasi	1.166.731.520	2.955.739.600	1.654.094.200	1.914.759.866	-	1.147.307.553	2.883.906.561	1.606.808.803	1.536.780.441		98	98	97	80	

Dari table di atas tergambar bahwa rasio terendah dalam penyerapan anggaran adalah pada tahun 2020. Beberapa kegiatan yang tidak mencapai target diantaranya adalah pada Program Pendidikan politik masyarakat khususnya pada kegiatan Bimtek pembuatan laporan Partai Politik. Kegiatan bimtek tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kurangnya waktu yang cukup yang disebabkan adanya perubahan penjadwalan pelaksanaan Pilkada 2020. Perubahan penjadwalan pelaksanaan Pilkada sehubungan terjadinya pandemic Covid 19 mengharuskan pelaksana kegiatan lebih mengutamakan sosialisai Pilkada 2020 demi suksesnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

A. Tantangan Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

##### **1. Kondisi Internal**

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- c. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- d. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

##### **2. Kondisi Eksternal**

Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tentu tidak terlepas dari kondisi internal Provinsi Kalimantan Timur sendiri. Diataranya meliputi: Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum serta Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.

a. Potensi Kerawanan Sosial di Kabupaten Paser.

Karakteristik Kabupaten Paser yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kalimantan Timur yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial / massa yang mengarah pada anarkhisme. Di samping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

b. Politisasi Nilai-Nilai Agama. Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Paser selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara – cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralisme lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.

Hal ini dibuktikan dengan dengan melihat tabel potensi konflik dan grafik konflik sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2020 pada daerah Kabupaten Paser.



Tabel Potensi Konflik tahun 2015 – 2020

Tahun	Bernuansa SARA	Pertanahan /Lahan	Aksi Unjuk Rasa di Perusahaan	Aksi Unjuk Rasa ke Pemerintah Daerah	Ketenaga kerjaan
2015	5	3	3	2	1
2016	4	3	4	3	2
2017	4	5	5	2	1
2018	2	5	2	2	2
2019	3	4	3	2	1
2020	1	6	4	2	1
2021	0	2	1	4	1

Sumber : laporan kejadian bidang wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : laporan kejadian bidang wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- c. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain

berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tri tunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (civil society) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai "penengah" yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

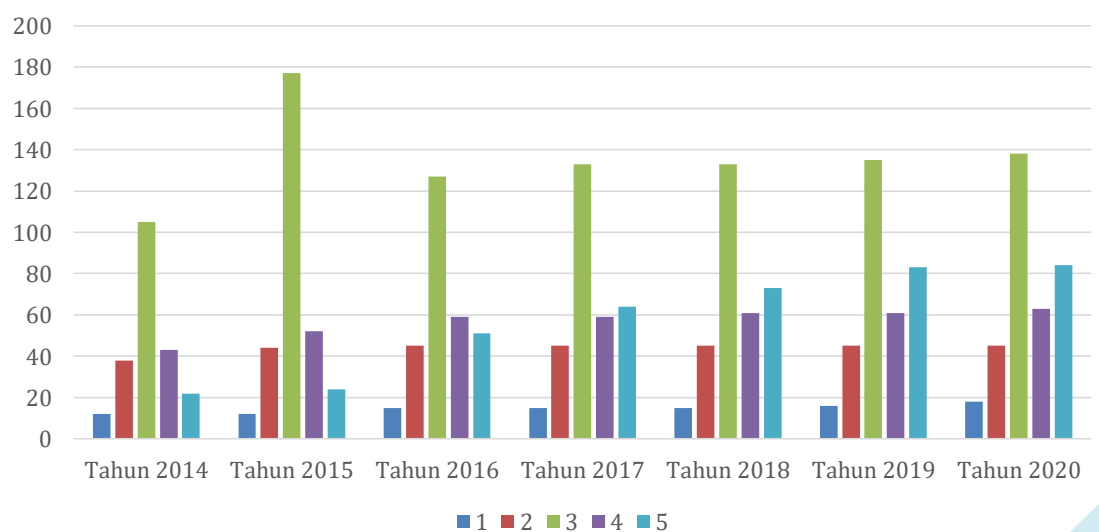
Tabel

**DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TERDAFTAR DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. PASER**

DATA ORGANISASI		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Paguyuban	12	12	15	15	15	16	18
2	OKP	38	44	45	45	45	45	45
3	Ormas	105	177	127	133	133	135	138
4	LSM	43	52	59	59	61	61	63
5	Yayasan	22	24	51	64	73	83	84

Sumber : Data Ormas Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Paser

**GRAFIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2014-2020**



Sumber : Data Ormas Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Paser

- d. Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.
- e. Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan harmonisasi masyarakat dan mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat belum maksimal pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah pusat tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- f. Program Pro-Masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
- g. Adanya perkembangan digitalisasi yang semakin maju sehingga terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat kita yang mengakibatkan pemahaman dan penghayatan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurun.
- h. Masih maraknya penyalahgunaan Narkoba diberbagai kalangan yang dapat yang dapat merugikan negara. Berdasarkan perkembangan pengungkapan kasus Narkoba di Kabupaten Paser dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, pada Tahun 2009 sebanyak 13 kasus dengan tersangka 23 orang, Tahun 2010 sebanyak 12 kasus dengan tersangka 13 orang, Tahun 2011 sebanyak 19 kasus dengan Tersangka 22 orang, Tahun 2012 sebanyak 19 kasus dengan tersangka 20 orang, dan Tahun 2013 sebanyak 26 kasus dengan tersangka 48 orang, Tahun 2014 Sebanyak 21 kasus dengan tersangka 31 orang, Tahun 2015 sebanyak 50 kasus dengan tersangka 65 orang, Tahun 2016 sebanyak 104 kasus dengan tersangka 1015

orang, Tahun 2017 sebanyak 71 kasus dengan 82 orang tersangka, Tahun 2018 sebanyak 87 Kasus dengan tersangka 122 orang, Tahun 2019 sebanyak 86 kasus tersangka 107 orang tersangka, Tahun 2020 sebanyak 132 kasus dengan tersangka 146 dan Tahun 2021 sebanyak 55 kasus dengan tersangka 71 orang mulai bulan Januari sampai bulan Juni.

TABEL

## PERKEMBANGAN KASUS DAN TERSANGKA NARKOTIKA DI KABUPATEN PASER

NO	TAHUN	KASUS	TERSANGKA
1	2009	13	23
2	2010	12	13
3	2011	19	22
4	2012	19	20
5	2013	26	48
6	2014	21	30
7	2015	55	70
8	2016	104	115
9	2017	71	82
8	2018	76	119
9	2019	86	107
10	2020	132	148
11	2021	55	71

Sumber : Data BNK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan:

1. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan, peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau early warning system untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh stakeholders bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak

untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka Tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.

2. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik, upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga - lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.
3. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stakeholder (Partai Politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik yang melibatkan Partai Politi, Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.
5. Peningkatan Anggaran dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.
6. Sarana dan Prasarana dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung

pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabuapten Paser.

7. Pembinaan terhadap masyarakat dengan kegiatan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara diskusi, dialog, interaktif, seminar, perlombaan dan kegiatan lainnya serta meningkatkan penggunaan teknologi sebagai sarana peningkatan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa masyarakat Kalimantan Timur

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

- Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan pengamalan nilai Pancasila dan masih rendahnya nilai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan masih rendahnya pemberdayaan ormas. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Masih belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban dan kewaspadaan masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Masih belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Sekretariat.

Berdasarkan gambaran pelayanan di atas, maka permasalahan-permasalahan pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan kesadaran politik	1. Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan idiologi Negara serta pengamalan nilai Pancasila.	1. Heterogenya masyarakat di Kabupaten Paser sehingga rentan terjadi gesekan sosial di masyarakat baik yang disebabkan olah SARA, Persoalan Ekonomi ataupun persoalan lainnya.

	<p>2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan masih rendahnya pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>1. Belum terbentuknya tim pemantauan perkembangan politik di daerah dalam menciptakan stabilitas politik di daerah secara berkesinambungan</p> <p>2. Masih Adanya temuan akuntabilitas terhadap laporan pertanggungjawaban partai politik.</p> <p>3. Kurangnya Pembinaan kelembagaan keormasan terhadap aturan yang berlaku.</p>
	<p>3. Masih belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban dan kewaspadaan masyarakat</p>	<p>1. Belum maksimalnya fungsi kewaspadaan dini di daerah.</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Bupati dan wakil Bupati Paser telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2022-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visinya adalah:

**“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”**

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.



Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

#### 1. **Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.**

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi. Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah

dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjamin.

2. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan**

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

3. **Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

4. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke 2 yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan”**, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Paser.

Berdasarkan penelaahan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memberikan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dari 5 (lima) misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdapat 3 (tiga) Misi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, yaitu :

- Pelaksanaan Misi ke 2, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan”**

Adapun arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk mewujudkan arah misi ini tentu diperlukan peran Badan Kesbangpol, khususnya dalam mewujudkan lingkungan daerah yang kondusif serta peran dalam menjaga stabilitas daerah serta peran dalam upaya pencegahan terjadinya konflik di daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjaga kondusifitas daerah dan perekonomian di daerah, Badan Kesbangpol melakukan program-program pembinaan masyarakat melalui pelaksanaan koordinasi kebijakan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

Pembinaan dimaksud meliputi pembinaan kepada pelajar/mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan OKP, Ormas dan LSM. Selain itu dilakukan pula program bela Negara serta pembinaan generasi muda terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya dari 3 (tiga) misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Waki Bupati Paser.

Adapun faktor penghambat diantaranya, yaitu :

1. Terdapatnya kesenjangan ekonomi masyarakat pribumi dan pendatang yang dapat memicu tumbuhnya konflik sosial, khususnya terkait penguasaan lahan pertanian dan lahan perkebunan yang rawan terhadap sengketa lahan. Bahkan beberapa diantara kasus perebutan penguasaan lahan ini dilakukan melalui cara-cara yang belum/tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya profesionalisme ASN dalam pelaksanaan tugas. Hal ini terkait diantaranya dengan pola mutasi, terbatasnya diklat fungsional serta lemahnya etos kerja/budaya kerja.
3. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba, tidak sebanding dengan kegiatan pembinaan atau pun kegiatan persuasive lainnya dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya untuk faktor pendorong diantaranya, yaitu :

1. Telah terbentuknya pola kemitraan pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol dengan masyarakat dalam menghadapi dan mengantisipasi segala bentuk perbedaan dalam masyarakat. Pola kemitraan tersebut diwujudkan dalam bentuk lembaga masyarakat seperti FKDM, FPK, FKUB.
2. Telah adanya fasilitasi program/kegiatan Forkopimda dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam memecahkan berbagai persoalan, baik yang menyangkut persoalan masyarakat maupun persoalan daerah melalui kegiatan koordinasi yang intensif dan terstruktur.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020 - 2024 adalah: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 tersebut adalah:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Selanjutnya adalah telaahan terhadap Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019 – 2023 memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan (2019-2023) dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Timur, Visinya adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-202, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser ada kesesuaian dalam mendukung pelaksanaan misi Gubernur, yaitu:

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Paser menjadi pedoman penataan ruang wilayah. Pedoman penataan ruang tersebut adalah dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah pengembangan serta keserasian antar sektor.

Adapun fungsi RTRW acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, acuan dalam pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten. Pelaksanaan fungsi RTRW ini dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; pedoman untuk menyusun penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten; dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang di yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi Pertanahan.

Rencana tata ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang Darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. dengan demikian RTRW Kabupaten Paser sangatlah strategis untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan sekaligus mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Paser yang menjamin keseimbangan daya dukung lingkungan bagi berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus selaras dengan tata ruang wilayah provinsi. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dan dengan memperhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser menjadi dua kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan non budidaya.

1. Untuk Kawasan Non Budidaya Meliputi :

- a. Kawasan lindung kawasan ini seluas 116.952 H terdapat di Kecamatan Muara komam bagian barat timur dan selatan Longkali bagian timur batu sopang bagian barat, dan Selatan dan longikis bagian barat;
- b. kawasan sempadan pantai kawasan ini sepanjang ±191,93 ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai titik batas sempadan dihitung kurang lebih 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
- c. Kawasan sempadan Sungai kawasan ini ditetapkan di sepanjang Sungai 100 meter di kiri kanan sungai besar dan kurang lebih 50 m dari kiri-kanan anak sungai.

2. Untuk Kawasan Budidaya Meliputi :

Kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaatkan secara produktif misalnya kawasan produksi hutan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Berdasarkan identifikasi tersebut dalam menjalankan urusan pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mengalokasikan anggaran pendapatan daerah yang terbatas pada anggaran belanja SKPD dalam rangka mendukung pengembangan kawasan agar membantu mendorong peningkatan pendapatan Asli daerah, selain itu anggaran belanja juga perlu diprioritaskan untuk menanggulangi kawasan rawan bencana alam guna meminimalisir dampak ekonomi sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasar paparan di atas, dapat dikemukakan faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jika ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Faktor penghambat diantaranya luasnya cakupan wilayah dan kendala geografis yang dapat menghambat cakupan wilayah pembinaan yang dilaksanakan. Selain itu Kabupaten Paser merupakan cakupan wilayah perbatasan, baik batas kabupaten maupun provinsi yang merupakan pintu masuk orang dan barang. Hal ini berimplikasi pada mudah masuknya pengaruh dari luar baik yang positif maupun yang negative.

Adapun untuk faktor pendorong diantaranya sebagai pintu gerbang masuknya orang dan barang menjadikan Kabupaten Paser diharapkan terjadi akulturasi budaya. Heterogenitas akan berdampak pada tingginya persaingan yang diharapkan mampu mendorong kemajuan perekonomian Kabupaten Paser.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Paser, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Perlunya upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar dan pemuda yang ada di Kabupaten Paser.
2. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terjaga dan terus dimantapkan.
4. Peningkatan, Pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan kristalisasi dari Renstra Perangkat Daerah agar apa yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dalam 5 tahun mendatang lebih spesifik dan terukur. Kejelasan indikator pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sumber daya organisasi selama 5 tahun mendatang lebih fokus dalam agenda kerjanya. Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

##### **4.1.1 TUJUAN**

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Paser.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsive dan tangkas
2. Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menjaga Kesatuan Bangsa dan politik

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).



Berdasarkan misi beserta penjelasannya, diatas maka sasaran pembangunan Badan Kesbangpol selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel
2. Mewujudkan masyarakat kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.
3. Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas.
4. Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama
5. Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman
6. Meningkatkan pemahaman idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table dibawah ini:

**Tabel T- C 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Optimal/ responsif dan tangkas	1.1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi  Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	70 B  B	73 B  B	75 B  BB	80 B  B	85 B  B
2	Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	2.1 Mewujudkan masyarakat kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.	Terwujudnya Lingkungan Daerah yang kondusif  Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	76 %  75 %	78 %  75 %	80 %  80 %	85 %  80 %	90 %  80 %
		2.2 Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Presentase Organisasi masyarakat yang difasilitasi	80%	80%	90%	100%	100%
		2.3. Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	Fasilitasi kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80%	80%	90%	100%	100%
		2.4. Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2.5. Meningkatkan pemahaman idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang idiologi pancasila	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### 5.1. STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2022-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan strategi :

1. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat
2. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan ormas
4. Meningkatkan pemahaman aparatur negara dan masyarakat tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan , UUD 1945 dan Bhineka tunggal Ika
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya P4GN (Pemcegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika)
6. Peningkatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan daerah
7. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan sebelum, saat dan pasca konflik
8. Peningkatan kesadaran dan menjaga perubahan perilaku masyarakat dari pengaruh politik, sosial dan ekonomi

### 5.2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2022-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan arah kebijakan :

1. Membina dan meningkatkan peran serta aparatur sehingga mencapai pola kerja yang baik menuju good governance
2. Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat sehingga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilu
3. Membina dan memberdayakan ormas
4. Penguatan kesadaran aparatur negara dan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Peningkatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda tokoh perempuan tokoh adat dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan penanganan narkoba

6. Peningkatan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas daerah
7. Peningkatan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
8. Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Pernyataan Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table TC- 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Optimal/ responsif dan tangkas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sarana prasana serta pengoptimalan teknologi informatika	Membina dan meningkatkan peran serta aparatur sehingga mencapai pola kerja yang baik menuju good governance
Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	Mewujudkan masyarakat kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik serta perilaku demokratis	Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat sehingga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilu
	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Membina dan memberdayakan ormas
	Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	Meningkatkan pemahaman aparatur negara dan masyarakat tentang negara, wawasan kebangsaan , UUD 1945 dan Bhineka tunggal Ika	Penguatan kesadaran aparatur negara dan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika)	Peningkatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda tokoh perempuan tokoh adat dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan penanganan narkoba
	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	Peningkatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan daerah	peningkatan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas daerah
		peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan sebelum, saat dan pasca konflik	peningkatan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila	Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tengah Tahun 2022 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan politik selama 5 (Lima) tahun mendatang adalah :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

###### **1.1. Kegiatan :**

###### **1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### **1.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

###### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

###### **1.1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

###### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

###### **1.1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

###### **Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan Mebeleur

#### **1.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

#### **1.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya

## **2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.**

**2.1. Kegiatan :** Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- b. Penyusunan bahan perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

- d. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

### **3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

**3.1. Kegiatan :** Perumusan Kebijakan Tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Penyusunan Bahan perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

### **4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Agama**

**4.1. Kegiatan :** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah

## **5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

**5.1. Kegiatan :** Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga



Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

## **6. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

**6.1. Kegiatan :** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Program kerja di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pelaksanaan Kebijaksanaan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- f. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

**TABEL T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PASER**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas				Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	68,85 B	70 B		73 B		75 B		80 B		85 B		85 B		Badan Kesbangpol	Kab. Paser
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel			Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	B		B		BB		A		A		A		Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	70%	72%	5,934,220,096	75%	5,937,728,666	80%	6,058,419,597	80%	6,110,395,893	80%	6,198,676,828	80%	30,239,441,080	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	42,502,300	10 Dokumen	42,502,300	10 Dokumen	43,139,835	10 Dokumen	43,786,933	10 Dokumen	44,443,736	50 Dokumen	216,375,104	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	14,300,000	5 Dokumen	14,300,000	5 Dokumen	14,514,500	5 Dokumen	14,732,218	5 Dokumen	14,953,200.76	25 Dokumen	72,799,919	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Laporan	28,202,300	5 Laporan	28,202,300	5 Laporan	28,625,335	5 Laporan	29,054,715	5 Laporan	29,490,535.24	25 Laporan	143,575,185	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	5,462,893,686	100%	5,462,893,686	100%	5,544,837,091	100%	5,628,009,648	100%	5,712,429,792	100%	27,811,063,903	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang per Bulan	35 Orang per Bulan	5,097,048,686	35 Orang per Bulan	5,097,048,686	35 Orang per Bulan	5,173,504,416	35 Orang per Bulan	5,251,106,983	35 Orang per Bulan	5,329,873,587.27	175 org/ 60 bulan	25,948,582,358	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	185 Dokumen	230 Dokumen	365,845,000	230 Dokumen	365,845,000	250 Dokumen	371,332,675	270 Dokumen	376,902,665	290 Dokumen	382,556,205.10	1270 Dokumen	1,862,481,545	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	100%	100%	<b>326,915,100</b>	100%	<b>327,854,700</b>	100%	<b>329,397,521</b>	100%	<b>330,963,484</b>	100%	<b>332,552,936</b>	100%	<b>1,647,683,741</b>	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2 Paket	353,700	1 Paket	353,700	1 Paket	359,006	1 Paket	364,391	1 Paket	369,856.44	5 Paket	1,800,653	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Paket	2 Paket	19,870,000	2 Paket	19,870,000	2 Paket	20,168,050	2 Paket	20,470,571	2 Paket	20,777,629.31	10 paket	101,156,250	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang tersedia	Paket	2 Paket	41,405,000	2 Paket	41,405,000	2 Paket	42,026,075	2 Paket	42,656,466	2 Paket	43,296,313.12	10 paket	210,788,854	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2 Paket	35,060,600	2 Paket	36,000,000	2 Paket	36,540,000	2 Paket	37,088,100	2 Paket	37,644,421.50	10 paket	182,333,122	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	12 Dokumen	5,225,800	12 Dokumen	5,226,000	12 Dokumen	5,304,390	12 Dokumen	5,383,956	12 Dokumen	5,464,715.19	60 Dokumen	26,604,861	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5 Laporan	20,000,000	6 Laporan	20,000,000	6 Laporan	20,000,000	6 Laporan	20,000,000	6 Laporan	20,000,000	30 Laporan	100,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	120 Laporan	200,000,000	120 Laporan	200,000,000	120 Laporan	200,000,000	120 Laporan	200,000,000	120 Laporan	200,000,000	600 Laporan	1,000,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	5,000,000	25 Dokumen	25,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya barang milik daerah	Unit	<b>4 Unit</b>	<b>17,120,510</b>	<b>2 Unit</b>	<b>19,688,580</b>	<b>2 Unit</b>	<b>19,983,909</b>	<b>2 Unit</b>	<b>20,283,667</b>	<b>2 Unit</b>	<b>20,587,922.34</b>	<b>12 Unit</b>	<b>97,664,588</b>	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.07.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 Unit	4 Unit	17,120,510	2 Unit	19,688,580	2 Unit	19,983,909	2 Unit	20,283,667	2 Unit	20,587,922.34	12 Unit	97,664,588	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	71,117,400	100%	71,117,400	100%	72,184,161	100%	73,266,924	100%	74,365,927	100%	362,051,812	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Laporan	6,430,000	12 Laporan	6,430,000	12 Laporan	6,526,450	12 Laporan	6,624,347	12 Laporan	6,723,711.95	60 Laporan	32,734,509	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	64,687,400	12 Bulan	64,687,400	12 Bulan	65,657,711	12 Bulan	66,642,577	12 Bulan	67,642,215.31	60 Bulan	329,317,303	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Presentase barang milik negara yang terpelihara	100%	100%	13,671,100	100%	13,672,000	100%	48,877,080	100%	14,085,237	100%	14,296,515	100%	104,601,931	Badan Kesbangpol	Kab. Paser		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	3 Unit	6,500,000	3 Unit	6,500,000	3 Unit	6,597,500	3 Unit	6,696,463	3 Unit	6,796,909.44	15 Unit	33,090,872	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	10 Unit	7,171,100	10 Unit	7,172,000	10 Unit	7,279,580	10 Unit	7,388,774	10 Unit	7,499,605.31	50 Unit	36,511,059	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
		8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1 Unit	35.000.000				1 Unit	35.000.000	Badan Kesbangpol	Kab. Paser	
Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik				Mewujudkan Lingkungan Darah Yang kondusif	52	76		78		80					85		90	BAKESBANGPOL	Kab. Paser
	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis			Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	75	75		75		80					80		80	BAKESBANGPOL	Kab. Paser
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	70	80	840,146,862.00	80	840,146,862.00	80	852,749,064.93	80	865,540,300.90	80	887,523,405.42	80	4,277,106,495,25	BAKESBANGPOL	Kab. Paser
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	0	5 Dokumen	840,146,862.00	5 Dokumen	840,146,862.00	5 Dokumen	852,749,064.93	5 Dokumen	865,540,300.90	5 Dokumen	887,523,405.42	25 Dokumen	4,277,106,495,25	BAKESBANGPOL	Kab. Paser
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	10 Dokumen	12.500.000	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	5 Dokumen	12.500.000	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	-	50 Orang	50.000.000	1000 Orang	50.000.000	1800 Orang	50.000.000	1800 Orang	50.000.000	1000 Orang	50.000.000	6.650 Orang	253.550.339	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	11 Dokumen	33 Orang	762,803,074	400 Orang	762,803,074	400 Orang	774,245,120	400 Orang	785,858,797	400 Orang	797,646,679	1.635 Orang	3,883,356,744	Badan Kesbangpol	Kab. Paser

## Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	1 Dokumen	2 Laporan	22.343.788	3 Laporan	22.343.788	3 Laporan	23.503.945,93	3 Laporan	23.503.945,90	3 Laporan	23.503.945,90	15 Laporan	115.199.414	Badan Kesbangpol	Kab. Paser
	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas			Fasilitasi Organisasi Masyarakat	75	80		80		90		100		100		100		BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif</b>	75%	75%	86,287,300	75%	136,287,300	75%	138,331,610	75%	140,406,583.60	75%	142,512,682	75%	643,825,476	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat yang dirumuskan		5 Dokumen	86,287,300	5 Dokumen	136,287,300	5 Dokumen	138,331,610	5 Dokumen	140,406,583.60	5 Dokumen	142,512,682	25 Dokumen	643,825,476	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	-	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	8 Dokumen	7.500.000	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	-	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	8 Dokumen	7.500.000	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	-	40 Orang	36.287.300	100 Orang	40.000.000	200 orang	40.000.000	250 orang	40.000.000	300 orang	40.000.000	890 Orang	196.287.300	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	-	40 Orang	25.000.000	80 Orang	41.287.300	200 Orang	41.287.300	250 Orang	41.287.300	350 Orang	41.287.300	920 Orang	190.149.200	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser

## Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	52.044.309	2 Laporan	54.119.283	2 Laporan	56.225.382	10 Laporan	232.388.974	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	Mewujudkan ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya			Fasilitasi Kebijakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	75	80		80		90		100		100		100		BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8:01:05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya	Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti		100	870,000,000.00	100	870,000,000.00	100	883,050,000.00	100	896,295,750.00	100	909,740,168.25	100	4,429,085,918	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan		5 Dokumen	870,000,000.00	5 Dokumen	870,000,000.00	5 Dokumen	883,050,000.00	5 Dokumen	896,295,750.00	5 Dokumen	909,740,168.25	25 Dokumen	4,429,085,918	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Enonomi Sosial Budaya dab Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Enonomi Sosial Budaya dab Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah		5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	203,000,000	5 Dokumen	206,045,000	5 Dokumen	209,135,675	25 Dokumen	1,018,180,675	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Enonomi Sosial Budaya dab Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Enonomi Sosial Budaya dab Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah		2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,750,000	2 Dokumen	51,511,250	2 Dokumen	52,283,919	10 Dokumen	254,545,168.75	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser

## Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah		40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	40 Orang	101,500,000	40 Orang	103,022,500	40 Orang	104,567,838	200 Orang	509,090,337.50	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi i Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah		100 Orang	504,999,930	100 Orang	504,999,930	120 Orang	512,574,929	120 Orang	520,263,553	120 Orang	528,067,506	560 Orang	2,570,905,848	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayatan Kepercayaan di Daerah		4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	15225000	4 Laporan	15,453,375	4 Laporan	15,685,176	20 Laporan	76,363,550.63	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman			Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	%	100%		100%		100%			100%		100%			BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	100	1,631,292,553.00	100	1,631,292,553.00	100	1,655,761,941.30	100	1,680,598,370.41	100	1,705,807,345.97	100	8,304,752,763.68	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.06.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dirumuskan		6 dokumen	1,631,292,553.00	6 dokumen	1,631,292,553.00	6 dokumen	1,655,761,941.30	6 dokumen	1,680,598,370.41	6 dokumen	1,705,807,345.97	30 dokumen	8,304,752,763.68	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser



Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	15,225,000.00	2 Dokumen	15,453,375.00	2 Dokumen	15,685,175.63	10 Dokumen	15,920,453.26	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	17,250,000.00	2 Dokumen	19,837,500.00	2 Dokumen	22,813,125.00	2 Dokumen	26,235,093.75	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		23 Orang	Rp 175,000,000	23 Orang	Rp 175,000,000	23 Orang	Rp 201,250,000	23 Orang	Rp 231,437,500	23 Orang	Rp 266,153,125	23 Orang	Rp 1,048,840,625	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		12 Orang	125,000,000.00	12 Orang	125,000,000.00	12 Orang	126,875,000.00	12 Orang	128,778,125.00	12 Orang	130,709,796.88	12 Orang	636,362,921.88	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser

## Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di susun		4 Laporan	Rp 24,004,500	4 Laporan	Rp 24,004,500	4 Laporan	Rp 24,364,567.50	4 Laporan	Rp 24,730,036	4 Laporan	Rp 25,100,987	4 Laporan	122,204,590.06	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 Dokumen	1,050,000,000.00	12 Dokumen	1,050,000,000.00	12 Dokumen	1,065,750,000.00	12 Dokumen	1,081,736,250.00	12 Dokumen	1,097,962,293.75	60 Dokumen	5,345,448,543.75	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	8.01.02	Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase penurunan konflik yang berbau sara	%	50	150,227,000.00	100	150,227,000.00	100	152,480,405.00	100	154,767,611.08	100	157,089,125.24	100	764,791,141.32	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Yang dirumuskan		6 Dokumen	150,227,000.00	6 Dokumen	150,227,000.00	6 Dokumen	152,480,405.00	6 Dokumen	154,767,611.08	6 Dokumen	157,089,125.24	30 Dokumen	764,791,141.32	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program kerja di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		-	-	4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	5,075,000.00	4 Dokumen	5,151,125.00	4 Dokumen	5,228,391.88	16 Dokumen	20,454,516.88	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun		2 Dokumen	50,227,000.00	2 Dokumen	50,227,000.00	2 Dokumen	50,980,405.00	2 Dokumen	51,745,111.08	2 Dokumen	52,521,287.74	10 Dokumen	255,700,803.82	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		-	-	250 Orang	500,000,000.00	250 Orang	507,500,000.00	250 Orang	515,112,500.00	250 Orang	522,839,187.50	1000 Orang	2,045,451,687.50	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		80 Orang	80,000,000.00	80 Orang	80,000,000.00	90 Orang	81,200,000.00	90 Orang	82,418,000.00	100 Orang	83,654,270.00	440 Orang	407,272,270.00	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser

## Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Paser 2022-2026

		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembaauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		4 Dokumen	20,000,000.00	4 Dokumen	20,000,000.00	4 Dokumen	20,300,000.00	Dokumen	20,604,500.00	4 Dokumen	20,913,567.50	20 Dokumen	101,818,067.50	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser
		8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		-	-	10 Keluarga	75,000,000.00	10 Keluarga	76125000	15 Keluarga	77,266,875.00	15 Keluarga	78,425,878.13	50 Keluarga	306,817,753.13	BAKESBA NGPOL	Kab. Paser

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel T-C 27 sebagai berikut :

**TABEL T-C.27**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PASER**

NO	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Presentase penurunan konflik yang berbaur sara	50	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	70	70	80	80	80	80	80	80	
3	Presentase Organisasi masyarakat (Ormas) yang aktif	NA	75	75	75	75	75	75	75	
4	Presentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	NA	100	100	100	100	100	100	100	
5	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan	NA	100	100	100	100	100	100	100	
6	Presentase kesadaran masyarakat akan pemahaman ideology pancasila	NA	80	80	80	80	80	80	80	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renstra ini, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam peningkatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selama lima tahun, pada tahun 2022 sampai dengan 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Renstra ini merupakan pedoman bagi semua kepala bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, untuk bersama-sama berkomitmen melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tana Paser, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Paser



**Nonding, S.Sos.MM**  
Pembina Utama Muda / IV c  
Nip. 197106071997031007